BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Stunting masih menjadi permasalahan serius dalam pembangunan kesehatan masyarakat di Indonesia. Meskipun berbagai kebijakan telah digulirkan oleh pemerintah pusat hingga daerah, permasalahan gizi kronis ini tetap menunjukkan resistensi, terutama di tingkat akar rumput. Salah satu contoh yang mencerminkan persoalan tersebut terjadi di Desa Ciangsana, Kabupaten Bogor. Sebagaimana diberitakan oleh Aktualita (2024), Pemerintah Desa Ciangsana mengajukan permohonan revisi terhadap Surat Keputusan (SK) Bupati Bogor Bogor Nomor: 400/220/Kpts/Per-UU/2023 Tentang Penetapan Lokasi Intervensi Stunting di Kabupaten Bogor Tahun 2024 terkait penetapan jumlah anak stunting, karena terdapat ketidaksesuaian antara data di lapangan dengan data yang tercantum dalam SK tersebut. Hal ini memunculkan kekhawatiran mengenai validitas data sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan intervensi stunting di tingkat lokal.

Permasalahan data yang tidak akurat bukan hanya menjadi persoalan teknis, tetapi juga menunjukkan tantangan dalam proses implementasi kebijakan. Data merupakan dasar utama dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Ketika data tidak sinkron, maka intervensi yang dilakukan berpotensi tidak tepat sasaran. Di sisi lain, kondisi lapangan menunjukkan bahwa hingga Januari 2025, di

wilayah kerja Puskesmas Ciangsana tercatat 40 balita mengalami *stunting*, 25 balita *wasting*, dan 86 balita *underweight.* Angka ini menandakan bahwa masalah gizi masih menjadi isu krusial di tingkat desa, meskipun berbagai program telah dilaksanakan untuk menekan prevalensi stunting.

Menurut data e-PPGBM tahun 2022, jumlah balita yang mengalami stunting di Kabupaten Bogor menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2022, angka stunting tercatat sebesar 4,78%, dan pada tahun 2023 turun menjadi 1,59%. Open Data Jabar tahun 2024, jumlah balita yang mengalami stunting di wilayah Kabupaten Bogor sebanyak 7.722 orang.

Dengan data tersebut masih diperlukan berbagai upaya strategis guna mewujudkan program Bogor Bebas Stunting *(GoBeSt).* Kabupaten Bogor sendiri merupakan salah satu dari 160 daerah yang menjadi lokus sasaran intervensi stunting, dengan target penurunan angka stunting menjadi 19,6% pada tahun 2023 melalui berbagai kebijakan, termasuk **Instruksi Bupati Nomor 440/884** tentang Intervensi Stunting Terintegrasi.

Secara nasional, pemerintah telah berupaya untuk menanggulangi permasalahan ini dengan menerbitkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021** tentang percepatan penurunan stunting. Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Indonesia menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 14,2% pada periode 2025-2029. Target ini

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting nasional tercatat sebesar 21,6%. Sementara itu, target penurunan stunting pada tahun 2024 adalah 14%, sehingga diperlukan rata-rata penurunan sebesar

2,7% per tahun agar target ini tercapai. Berikut prevalensi stunting pada tahun 2022 sebagai berikut.

Gambar 1.1 Prevalensi Stunting di Indonesia
Sumber: Survei Status Gizi Indonesia tahun 2022

Berdasarkan grafik di atas, prevalensi stunting menunjukkan tren penurunan. Namun, menjelang tahun 2024, angka penurunan stunting yang ditargetkan sebesar 14% masih belum tercapai, dengan angka prevalensi pada tahun 2022 berada di 21,6%. Untuk mencapai target tersebut pada tahun 2024, diperlukan rata-rata penurunan sebesar 2,7% per tahun. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat krusial dalam upaya pencapaian target penurunan stunting.

Menurut *World Health Organization* (WHO), suatu masalah kesehatan masyarakat dikategorikan kronis apabila prevalensi stunting melebihi 20%. Dengan angka prevalensi yang masih di atas standar WHO, stunting di Indonesia masih tergolong sebagai masalah kesehatan yang serius.

Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang terjadi akibat asupan gizi yang tidak mencukupi dalam jangka waktu lama, terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi ini tidak hanya menyebabkan hambatan pertumbuhan fisik, tetapi juga meningkatkan kerentanan terhadap penyakit dan mengancam perkembangan kognitif anak. Dampaknya bisa berlanjut hingga usia dewasa, memengaruhi tingkat kecerdasan dan produktivitas individu. Oleh karena itu, upaya percepatan penurunan stunting sangat diperlukan untuk memastikan kualitas generasi masa depan yang lebih baik.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menekankan bahwa stunting merupakan ancaman serius bagi kualitas sumber daya manusia. Jika tidak ditangani dengan baik, stunting dapat berlanjut ke generasi berikutnya dan memperburuk kondisi kesehatan serta kualitas hidup masyarakat di masa mendatang. Oleh karena itu, penanganan stunting harus menjadi prioritas dalam kebijakan kesehatan nasional guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan *(Sustainable Development Goals/SDGs)*, dalam poin ke-2 dalam penghapusan kelaparan, peningkatan ketahanan pangan, dan perbaikan gizi anak-anak di Indonesia.

Dampaknya tidak hanya terbatas pada pertumbuhan fisik, tetapi juga mempengaruhi perkembangan otak anak, yang berpotensi menghambat kemampuan kognitif dan prestasi mereka. Selain itu, jika tidak ditangani dengan baik, stunting dapat berlanjut ke generasi berikutnya, memperburuk masalah kesehatan dan kualitas hidup di masa depan. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi juga lintas sektor melalui pendekatan integratif dan berkelanjutan. Dalam

konteks inilah, implementasi kebijakan menjadi titik krusial dalam menentukan keberhasilan program penurunan stunting. Untuk menelaah bagaimana kebijakan intervensi stunting dijalankan secara efektif di tingkat lokal, teori implementasi kebijakan **George C. Edward III** digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi**.** Jika salah satu variabel tidak terpenuhi dengan baik, maka proses pelaksanaan kebijakan akan mengalami kendala.

Namun pada kenyataannya berdasarkan hasil observasi penliti di lapangan menemukan bahwa indikator dari Implementasi Kebijakan dari **George C. Edward III** yaitu sumber daya menunjukkan adanya kekurangan jumlah personil Sumber Daya Manusia (SDM) dan kompetensi staf yang ada khususnya kader posyandu dan satu aspek dari disposisi ini adalah insentif peneliti menemukan bahwa tanpa adanya dukungan insentif, maka akan sulit untuk mempertahankan motivasi dan semangat kerja, apalagi dalam kondisi beban kerja yang tinggi dan keterbatasan sumber daya yang ada di Puskesmas Ciangsana.

Dalam hal ini, implementasi kebijakan intervensi stunting di Puskesmas Ciangsana menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena posisinya sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan di tingkat pelayanan dasar. Bagaimana komunikasi dilakukan dari dinas kesehatan ke puskesmas dan masyarakat, sejauh mana sumber daya (SDM, informasi, fasilitas, dan kewenangan) mendukung pelaksanaan program, bagaimana sikap dan kepatuhan kader dan petugas lapangan terhadap

kebijakan, serta sejauh mana struktur birokrasi dan SOP mendukung keberhasilan pelaksanaan, menjadi fokus utama dalam analisis ini.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengetahui secara lebih jelas bagaimana kebijakan intervensi stunting terintegrasi dijalankan di wilayah kerja Puskesmas Ciangsana, serta bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas implementasinya di masa mendatang bagi masyarakat dan *stakeholders* terkait.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknnya data yang di peroleh di lapangan. Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi perekonomian dan sosial ini dimaksudakan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. **(Sugiyono 2017:207)** pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan reabilitas masalah yang akan dipecahkan. Penelitian ini difokuskan meliputi:

1) Bagaimana implementasi Kebijakan Intervensi Stunting Terintegrasi di Puskesmas Ciangsana Kabupaten Bogor?
2) Apa saja faktor yang penghambat dan pendukung implementasi Kebijakan Intervensi Stunting Terintegrasi di Puskesmas Ciangsana Kabupaten Bogor?
3) Apa solusi yang dapat diberikan untuk efektivitas implementasi kebijakan intervensi srunting di Puskesmas Ciangsana Kabupaten Bogor?

Adapun indikator implementasi kebijakan menurut George C. Edward III (1980) dalam Agustino (2020:154), yaitu :

1. Komunikasi *(Communication)*
2. Sumber Daya *(Resources)*
3. Disposisi *(Disposition)*
4. Struktur Birokrasi *(Bureaucratic Structure)*

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan dan melihat luasnya cakupan masalah di atas maka peneliti menganggap penting perumusan masalah yang menjadi bahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bagaimana implementasi Kebijakan Intervensi Stunting Terintegrasi di Puskesmas Ciangsana?
2) Apa saja faktor yang menghambat implementasi Kebijakan Intervensi Stunting Terintegrasi di Puskesmas Ciangsana Kabupaten Bogor?
3) Apa solusi yang dapat diberikan untuk efektivitas implementasi kebijakan intervensi srunting di Puskesmas Ciangsana Kabupaten Bogor?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan di atas maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Mengetahui bagaimana analisis implementasi kebijakan intervensi stunting di Puskesmas Ciangsana Kabupaten Bogor.
2) Mengidentifikasi faktor yang menghambat implementasi Kebijakan Intervensi Stunting Terintegrasi di Puskesmas Ciangsana Kabupaten Bogor.

3) Memberikan solusi untuk efektivitas implementasi kebijakan intervensi stunting di Puskesmas Ciangsana Kabupaten Bogor.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan pembaca tentang bagaimana implementasi kebijakan intervensi penurunan stunting terintegrasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor (Studi Kasus: Puskesmas Ciangsana). Selain itu penelitian ini juga dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah ilmu pengetahuan dan wawasan keilmuan Administrasi Publik secara umum, serta khususnya mengenai Implementasi Kebijakan Intervensi Penurunan Stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor (Studi Kasus : Puskesmas Ciangsana).

1.5.2 Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi atau pemikiran yang bermanfaat sebagai bahan pertimbangan instansi pemerintah daerah khususnnya di Puskesmas Ciangsana Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Intervensi Stunting Terintegrasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor (Studi Kasus: Puskesmas Ciangsana).